



**GUBERNUR SULAWESI BARAT**  
**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT**  
**NOMOR 1 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang;
- b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk melaporkan kekayaannya;
- c. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan kerja sama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan harta kekayaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

Memperhatikan

1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/01/M.PAN/01/2008 tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;



5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 700/1590/57 pada tanggal 28 April 2016 tentang Penegasan Kembali Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
6. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Penyelenggara Negara adalah Penyelenggara Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
7. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
8. Wajib Lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menyampaikan laporan harta kekayaannya kepada KPK.
9. Pengelola LHKPN adalah unit yang mengelola dan mengoordinasikan LHKPN.
10. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
11. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
12. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh Gubernur untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan instansinya.
13. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh kepala unit kerja untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya.

BAB II  
WAJIB LAPOR  
Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari :
  - a. gubernur;
  - b. wakil gubernur;
  - c. pejabat struktural eselon I, eselon II, eselon III dan eselon IV;
  - d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
  - e. pejabat fungsional auditor;
  - f. pejabat fungsional pengawas penyelenggara urusan pemerintah di daerah;
  - g. pejabat fungsional auditor kepegawaian;
  - h. Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
  - i. Pejabat Pengelola Keuangan;
  - j. pejabat yang mengeluarkan perizinan; dan
  - k. penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK.
- (3) Daftar Penyelenggara Negara yang wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

BAB III  
PENYAMPAIAN LHKPN  
Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada KPK yaitu pada saat :
  - a. Pengangkatan pertama sebagai Penyelenggara Negara;
  - b. pengangkatan kembali sebagai Pejabat Negara setelah berakhirnya masa Jabatan atau Pensiun; dan
  - c. berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhir jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN selama penyelenggara negara menjabat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a dan b dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

## Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
  - a. melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat **www.elhkpn.kpk.go.id**; dan
  - b. mengisi formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimkan melalui email **elhkpn@kpk.go.id** atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung dikantor KPK atau Pos) dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data. Formulir excel tersebut dapat diunduh melalui **www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn**.
- (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. nama;
  - b. jabatan;
  - c. instansi;
  - d. tempat dan tanggal lahir;
  - e. alamat;
  - f. identitas istri atau suami;
  - g. identitas anak;
  - h. jenis, nilai dan asal usul perolehan harta kekayaan yang dimiliki;
  - i. besarnya penghasilan dan pengeluaran;
  - j. surat kuasa mendapatkan data keuangan;
  - k. surat kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan
  - l. surat pernyataan.

## BAB IV

### PENGELOLA LHKPN

## Pasal 6

- (1) Untuk mengelola dan mengoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN;
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. koordinator LHKPN adalah Sekretaris Daerah Provinsi;
  - b. wakil koordinator 1 LHKPN adalah Inspektur Provinsi;
  - c. wakil koordinator 2 LHKPN adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi; dan
  - d. administrator LHKPN adalah pejabat yang ditunjuk Gubernur sebagai Admin Instansi.
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. koordinator LHKPN berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN dalam **www.elhkpn.kpk.go.id**;

b. administrator bertugas untuk :

- 1) Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun;
  - 2) Melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke dalam Aplikasi e-LHKPN;
  - 3) Mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
  - 4) Memiliki peran membuat akun admin unit kerja, melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan *update* perubahan data wajib lapor.
- (4) Unit pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

#### Pasal 7

- (1) Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN.
- (2) Admin Unit Kerja Pengelola LHKPN Tingkat OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
  - a. membuat akun Penyelenggara Negara/ Wajib LHKPN;
  - b. membuat / *Update* daftar wajib lapor;
  - c. melakukan pendampingan pengisian/e-filling; dan
  - d. memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing OPD/Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi.
- (3) Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN di masing-masing OPD/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD.

#### BAB V

#### SANKSI

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan
  - b. pembebasan dari jabatan.

#### BAB V

#### TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

#### Pasal 9

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
  - a. diberikan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan; dan
  - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.



- (2) Sebelum penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Provinsi sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Penjatuhan sanksi terhadap Wajib LHKPN yang tidak mematuhi ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat tim penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 14 Maret 2018

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

ttd

**H. M. ALI BAAL MASDAR**

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT,**

ttd

**H. ISMAIL ZAINUDDIN**

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2018 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Mamuju, 19 Maret 2018

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

**BUJAERAMY HASSAN, SH**

Pangkat : Pembina

NIP. : 19750630 200212 1 010

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR : 1 TAHUN 2018

TANGGAL : 14 MARET 2018

PERIHAL : LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

DAFTAR PENYELENGGARA NEGARA YANG WAJIB LAPOR

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA SUB UNIT KERJA	NAMA JABATAN	ESELONISASI
1	PIMPINAN TERTINGGI	KEPALA LEMBAGA	GUBERNUR	0
2	WAKIL PIMPINAN	WAKIL KEPALA LEMBAGA	WAKIL GUBERNUR	0
3	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIS DAERAH	I
4		ASISTEN I	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN	II
5		ASISTEN II	ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	II
6		ASISTEN III	ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM	II
7		STAF AHLI	STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK	II
8		STAF AHLI	STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	II
9		STAF AHLI	STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA APARATUR	II
10		BIRO TATA PEMERINTAHAN	KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN	II
11		BIRO HUKUM	KEPALA BIRO HUKUM	II
12		BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	KEPALA BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	II
13		BIRO HUMAS DAN PROTOKOL	KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL	II
14		BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	KEPALA BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	II
15		BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN	KEPALA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN	II
16		BIRO TATA PEMERINTAHAN	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM	III
17			KEPALA BAGIAN OTONOMI DAERAH	III
18			KEPALA BAGIAN KAWASAN DAN AGRARIA	III
19			KEPALA SUBBAGIAN TOPONOMI DAN BATAS DAERAH	IV
20			KEPALA SUBBAGIAN DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN DAN KERJA SAMA	IV
21			KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO	IV
22			KEPALA SUBBAGIAN PENATAAN DAERAH OTONOM	IV
23			KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI KINERJA DAN PENINGKATAN KAPASITAS DAERAH	IV
24			KEPALA SUBBAGIAN FASILITASI KEPALA DAERAH DAN DPRD	IV
25			KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI PENGADAAN TANAH DAN PENSERTIFIKATAN	IV
26			KEPALA SUBBAGIAN PENANGANAN KONFLIK DAN SENGKETA PERTANAHAN	IV
27			KEPALA SUBBAGIAN PENATAAN KAWASAN	IV
28		BIRO HUKUM	KEPALA BAGIAN DOKUMENTASI PRODUK HUKUM DAN TATA USAHA BIRO	III
29			KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN	III
30			KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAM	III
31			KEPALA SUBBAGIAN INVENTARISASI DAN INFORMASI HUKUM	IV

32			KEPALA SUBBAGIAN PENGUNDANGAN DAN AUTENTIFIKASI PRODUK HUKUM	IV
33			KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO	IV
34			KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	IV
35			KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RANCANGAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAN PRODUK HUKUM LAINNYA	IV
36			KEPALA SUBBAGIAN PENGKAJIAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH	IV
37			KEPALA SUBBAGIAN PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAM	IV
38			KEPALA SUBBAGIAN SENGKETA HUKUM	IV
39			KEPALA SUBBAGIAN TINDAK LANJUT DAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA DAN DAERAH	IV
40		BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI DAN BINA PEMBANGUNAN	III
41			KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN	III
42			KEPALA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH	III
43			KEPALA SUBBAGIAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	IV
44			KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS PENDATAAN SARANA DAN PRASARANA	IV
45			KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO	IV
46			KEPALA SUBBAGIAN PEREKONOMIAN	IV
47			KEPALA SUBBAGIAN BINA PRODUKSI DAN PEMASARAN PRODUK DAERAH	IV
48			KEPALA SUBBAGIAN KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN PEREKONOMIAN	IV
49			KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN PENGADAAN	IV
50			KEPALA SUBBAGIAN MONEV PENGADAAN	IV
51			KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN DOKUMENTASI PENGADAAN	IV
52		BIRO HUMAS DAN PROTOKOL	KEPALA BAGIAN DOKUMENTASI DAN PENATAUSAHAAN	III
53			KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT	III
54			KEPALA BAGIAN PROTOKOL	III
55			KEPALA SUBBAGIAN DOKUMENTASI DAN PENGARSIPAN	IV
56			KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN DATA	IV
57			KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO	IV
58			KEPALA SUBBAGIAN PELAYANAN MEDIA, PUBLIKASI, DAN PENERBITAN	IV
59			KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN PENGELOLAAN INFORMASI	IV
60			KEPALA SUBBAGIAN PENYIAPAN NASKAH DAN SAMBUTAN	IV
61			KEPALA SUBBAGIAN PENGATURAN ACARA	IV
62			KEPALA SUBBAGIAN PELAYANAN TAMU	IV
63			KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN KEPROTOKOLAN	IV
64		BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	KEPALA BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISA JABATAN	III
65			KEPALA BAGIAN TATA LAKSANA DAN REFORMASI BIROKRASI	III
66			KEPALA BAGIAN PENGEMBANGAN KINERJA DAN PELAYANAN PUBLIK	III
67			KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS DAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN	IV
68			KEPALA SUBBAGIAN ANALISA DAN FORMASI JABATAN	IV
69			KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KELEMBAGAAN SERTA KINERJA KABUPATEN/KOTA	IV

70			KEPALA SUBBAGIAN TATA KERJA DAN PROSEDUR	IV
71			KEPALA SUBBAGIAN REFORMASI BIROKRASI	IV
72			KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO	IV
73			KEPALA SUBBAGIAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN	IV
74			KEPALA SUBBAGIAN PELAYANAN PUBLIK	IV
75			KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN	IV
76		BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN	KEPALA BAGIAN KEUANGAN DAN TATA USAHA	III
77			KEPALA BAGIAN RUMAH TANGGA	III
78			KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN	III
79			KEPALA SUBBAGIAN VERIFIKASI, PEMBUKUAN DAN PELAPORAN	IV
80			KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN	IV
81			KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN ADMINISTRASI UMUM	IV
82			KEPALA SUBBAGIAN PELAYANAN ADMINISTRASI PIMPINAN	IV
83			KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA, TAMU PIMPINAN DAN AKOMODASI	IV
84			KEPALA SUBBAGIAN PEMELIHARAAN GEDUNG, KENDARAAN DINAS DAN PERALATAN LAINNYA	IV
85			KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS KEBUTUHAN	IV
86			KEPALA SUBBAGIAN PENGADAAN	IV
87			KEPALA SUBBAGIAN INVENTARISASI, PENYIMPANAN DAN PENDISTRIBUSIAN	IV
88	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA DINAS	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	II
89		SEKRETARIAT	SEKRETARIS	III
90			KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	IV
91			KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET	IV
92			KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
93		BIDANG SEKOLAH MENENGAH ATAS	KEPALA BIDANG SEKOLAH MENENGAH ATAS	III
94			KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN	IV
95			KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA	IV
96			KEPALA SEKSI PESERTA DIDIK & PEMB. KARAKTER	IV
97		BIDANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KEPALA BIDANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	III
98			KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN	IV
99			KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA	IV
100			KEPALA SEKSI PESERTA DIDIK & PEMB. KARAKTER	IV
101		BIDANG PENDIDIKAN KHUSUS,TUGAS PEMBANTUAN PAUD DAN PENDIDIKAN DASAR	KEPALA BIDANG PENDIDIKAN KHUSUS,TUGAS PEMBANTUAN PAUD DAN PENDIDIKAN DASAR	III
102			KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN TP PAUD & DIKDAS	IV
103			KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA/PRASARANA TP PAUD DIKDAS	IV
104			KEPALA SEKSI PESERTA DIDIK & PEMB. KARAKTER TP PAUD DIKDAS	IV
105		BIDANG KEBUDAYAAN	KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN	III
106			KEPALA SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN	IV

107			KEPALA SEKSI SEJARAH DAN TRADISI	IV
108			KEPALA SEKSI KESENIAN & TENAGA KEBUDAYAAN	IV
109		BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	KEPALA BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	III
110			KEPALA SEKSI PTK SMA	IV
111			KEPALA SEKSI PTK SMK	IV
112			KEPALA SEKSI PTK KHUSUS	IV
113		UPTD	KEPALA UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN (BPTKP)	
114		UPTD	KEPALA UPTD MUSEUM	
115		UPTD	KEPALA UPTD TAMAN BUDAYA	
116	DINAS SOSIAL	KEPALA DINAS	KEPALA DINAS SOSIAL	II
117		SEKRETARIAT	SEKRETARIS	III
118			KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	IV
119			KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET	IV
120			KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
121		BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN	III
122			KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT), KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL	IV
123			KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN PERORANGAN, KELUARGA DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT (PPKKM) SERTA PENGELOLAAN SUMBER DANA BANTUAN SOSIAL	IV
124			KEPALA SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN	IV
125		BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	III
126			KEPALA SEKSI BANTUAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	IV
127			KEPALA SEKSI BANTUAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL DAN BENCANA LAIN	IV
128			KEPALA SEKSI JAMINAN SOSIAL	IV
129		BIDANG REHABILITASI SOSIAL	KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL	III
130			KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANSIA	IV
131			KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	IV
132			KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA, TUNA SOSIAL, KORBAN TINDAK KEKERASAN DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG	IV
133		BIDANG PENGEMBANGAN MENTAL SPIRITUAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN MENTAL SPIRITUAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	III
134			KEPALA SEKSI KEAGAMAAN DAN SARANA PRASARANA PERIBADATAN	IV
135			KEPALA SEKSI BINA MENTAL SPIRITUAL	IV
136			KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	IV
137		UPTD	KEPALA UPTD PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	
138	DINAS TENAGA KERJA	KEPALA DINAS	KEPALA DINAS TENAGA KERJA	II
139		SEKRETARIAT	SEKRETARIS	III

140			KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	IV
141			KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
142		BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	III
143			KEPALA SEKSI PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS	IV
144			KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	IV
145			KEPALA SEKSI PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM DAN LUAR NEGERI	IV
146		BIDANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	KEPALA BIDANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	III
147			KEPALA SEKSI PENGAWASAN NORMA KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	IV
148			KEPALA SEKSI PENGAWASAN NORMA KERJA PEREMPUAN DAN ANAK	IV
149			KEPALA SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	IV
150			KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	III
151			KEPALA SEKSI PERSYARATAN KERJA, KELEMBAGAAN DAN KERJA SAMA HUBUNGAN INDUSTRIAL	IV
152			KEPALA SEKSI PENGUPAHAN DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	IV
153			KEPALA SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	IV
154		UPTD	KEPALA UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I	
155			KEPALA UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II	
156			KEPALA UPTD BALAI LATIHAN KERJA	
157	DINAS TRANSMIGRASI	KEPALA DINAS	KEPALA DINAS TRANSMIGRASI	II
158		SEKRETARIAT	SEKRETARIS	III
159			KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	IV
160			KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET	IV
161			KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
162		BIDANG PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN TRANSMIGRASI	KEPALA BIDANG PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN TRANSMIGRASI	III
163			KEPALA SEKSI PERENCANAAN TRANSMIGRASI	IV
164			KEPALA SEKSI BINA POTENSI KAWASAN TRANSMIGRASI	IV
165			KEPALA SEKSI PERENCANAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSMIGRASI	IV
166		BIDANG PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI	KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI	III
167			KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI	IV
168			KEPALA SEKSI PENATAAN DAN PERSEBARAN PENDUDUK	IV
169			KEPALA SEKSI KERJA SAMA ANTAR DAERAH TRANSMIGRASI	IV
170		BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	III
171			KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	IV
172			KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN USAHA DAN SOSIAL BUDAYA	IV
173			KEPALA SEKSI PROMOSI DAN KERJA SAMA KELEMBAGAAN TRANSMIGRASI	IV
174		BIDANG FASILITASI PERTANAHAN DAN PELATIHAN TRANSMIGRASI	KEPALA BIDANG FASILITASI PERTANAHAN DAN PELATIHAN TRANSMIGRASI	III
175			KEPALA SEKSI PENYEDIAAN PERTANAHAN TRANSMIGRASI	IV

176			KEPALA SEKSI PELAYANAN PERTANAHAN TRANSMIGRASI	IV
177			KEPALA SEKSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSMIGRASI	IV
178		UPTD	KEPALA UPTD BALAI LATIHAN TRANSMIGRASI	
179	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KEPALA DINAS	KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	II
180		SEKRETARIAT	SEKRETARIS	III
181			KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	IV
182			KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
183		BIDANG LAYANAN KEPEMUDAAN	KEPALA BIDANG LAYANAN KEPEMUDAAN	III
184			KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN PEMUDA	IV
185			KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PEMUDA	IV
186			KEPALA SEKSI INFRASTRUKTUR DAN KEMITRAAN PEMUDA	IV
187		BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA	KEPALA BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA	III
188			KEPALA SEKSI OLAHRAGA PENDIDIKAN DAN SENTRA OLAHRAGA	IV
189			KEPALA SEKSI OLAHRAGA REKREASI, TRADISIONAL DAN LAYANAN KHUSUS	IV
190			KEPALA SEKSI KEMITRAAN, PENGHARGAAN DAN OLAHRAGA	IV
191		BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA	KEPALA BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA	III
192			KEPALA SEKSI PEMBIBITAN, IPTEK DAN TENAGA KEOLAHRAGAAN	IV
193			KEPALA SEKSI PROMOSI OLAHRAGA DAN OLAHRAGA PRESTASI	IV
194			KEPALA SEKSI STANDARDISASI DAN INFRASTRUKTUR OLAHRAGA	IV
195		UPTD	KEPALA UPTD PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR (PPLP)	
196	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KEPALA DINAS	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	II
197		SEKRETARIAT	SEKRETARIS	III
198			KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	IV
199			KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
200		BIDANG FASILITASI PENDAFTARAN PENDUDUK	KEPALA BIDANG FASILITASI PENDAFTARAN PENDUDUK	III
201			KEPALA SEKSI FASILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDAFTARAN PENDUDUK	IV
202			KEPALA SEKSI BINA APARATUR PENDAFTARAN PENDUDUK	IV
203			KEPALA SEKSI MONITORING, EVALUASI DAN DOKUMENTASI	IV
204		BIDANG FASILITASI PENCATATAN SIPIL	KEPALA BIDANG FASILITASI PENCATATAN SIPIL	III
205			KEPALA SEKSI FASILITASI SARANA DAN PRASARANA PENCATATAN SIPIL	IV
206			KEPALA SEKSI BINA APARATUR PENCATATAN SIPIL	IV
207			KEPALA SEKSI MONITORING, EVALUASI DAN DOKUMENTASI	IV
208		BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (PIAK) DAN PEMANFAATAN DATA	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (PIAK) DAN PEMANFAATAN DATA	III
209			KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN	IV
210			KEPALA SEKSI KERJASAMA DAN INOVASI PELAYANAN	IV

211			KEPALA SEKSI MONITORING DAN EVALUASI	IV
212	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	KEPALA SATUAN	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	II
213		SEKRETARIAT	SEKRETARIS	III
214			KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	IV
215			KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET	IV
216			KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
217		BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH	KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH	III
218			KEPALA SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN	IV
219			KEPALA SEKSI PEMBINAAN, PENYULUHAN DAN PELATIHAN	IV
220			KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PENGAWASAN	IV
221		BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	III
222			KEPALA SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN	IV
223			KEPALA SEKSI KERJA SAMA	IV
224			KEPALA SEKSI SUMBER DAYA APARATUR	IV
225		BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT	III
226			KEPALA SEKSI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	IV
227			KEPALA SEKSI BINA POTENSI MASYARAKAT	IV
228			KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN	IV
229		BIDANG PEMADAM KEBAKARAN	KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN	III
230			KEPALA SEKSI PELATIHAN DAN PENCEGAHAN KEBAKARAN	IV
231			KEPALA SEKSI KOORDINASI DAN KERJASAMA ANTAR WILAYAH	IV
232			KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA OPERASIONAL	IV
233	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	KEPALA BADAN	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	II
234		SEKRETARIAT	SEKRETARIS	III
235			KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	IV
236			KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET	IV
237			KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
238		BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	III
239			KEPALA SUB BIDANG PENCEGAHAN	IV
240			KEPALA SUB BIDANG KESIAPSIAGAAN	IV
241		BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	III
242			KEPALA SUB BIDANG KEDARURATAN	IV
243			KEPALA SUB BIDANG LOGISTIK	IV
244		BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	III

245			KEPALA SUB BIDANG REHABILITASI	IV
246			KEPALA SUB BIDANG REKONSTRUKSI	IV
247	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KEPALA BADAN	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	II
248		SEKRETARIAT	SEKRETARIS	III
249			KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN	IV
250			KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN	IV
251			KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
252		BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	KEPALA BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	III
253			KEPALA SUB BIDANG IDEOLOGI	IV
254			KEPALA SUB BIDANG WAWASAN KEBANGSAAN	IV
255		BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL	KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL	IV
256			KEPALA SUB BIDANG KEWASPADAAN DINI, PENGAWASAN ORANG DAN LEMBAGA ASING	III
257			KEPALA SUB BIDANG PENANGANAN KONFLIK DAN KERJASAMA INTELKAM	IV
258		BIDANG SENI, BUDAYA, AGAMA, KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI	KEPALA BIDANG SENI, BUDAYA, AGAMA, KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI	IV
259			KEPALA SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA	IV
260			KEPALA SUB BIDANG KETAHANAN AGAMA, KEMASYARAKATAN EKONOMI	III
261		BIDANG POLITIK	KEPALA BIDANG POLITIK	IV
262			KEPALA SUB BIDANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DAN PENDIDIKAN POLITIK	IV
263			KEPALA SUB BIDANG KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK DAN FASILITAS PEMILU	IV
264	SEKRETARIAT DPRD	KEPALA SEKRETARIAT	KEPALA SEKRETARIAT DPRD	II
265		BAGIAN UMUM DAN HUMAS	KEPALA BAGIAN UMUM DAN HUMAS	III
266			KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA, KEPEGAWAIAN DAN HUMAS	IV
267			KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA, PERLENGKAPAN, TRANTIB DAN PROTOKOL	IV
268		BAGIAN PERSIDANGAN	KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN	III
269			KEPALA SUBBAGIAN RISALAH, RAPAT DAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	IV
270			KEPALA SUBBAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN, PELAPORAN DAN PERPUSTAKAAN	IV
271		BAGIAN KEUANGAN	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	III
272			KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	IV
273			KEPALA SUBBAGIAN PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN	IV
274	INSPEKTORAT DAERAH	KEPALA INSPEKTORAT	INSPEKTUR	II
275		SEKRETARIAT	SEKRETARIS	III
276			KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	IV
277			KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV

278		INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I	III
279			INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II	III
280			INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III	III
281		AUDITOR	AUDITOR PENYELIA	
282			AUDITOR PERTAMA	
283			AUDITOR MUDA	
284			AUDITOR MADYA	
285			AUDITOR UTAMA	
286		PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	PENGAWAS PEMERINTAHAN PERTAMA	
287			PENGAWAS PEMERINTAHAN MUDA	
288			PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA	
289			PENGAWAS PEMERINTAHAN UTAMA	
290	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KEPALA DINAS	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	II
291		SEKRETARIAT	SEKRETARIS	III
292			KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	IV
293			KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
294		BIDANG BINA MARGA	KEPALA BIDANG BINA MARGA	III
295			KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN JALAN	IV
296			KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN JEMBATAN	IV
297			KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS	IV
298		BIDANG CIPTA KARYA	KEPALA BIDANG CIPTA KARYA	III
299			KEPALA SEKSI AIR MINUM	IV
300			KEPALA SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	IV
301			KEPALA SEKSI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	IV
302		BIDANG CIPTA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	KEPALA BIDANG CIPTA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	III
303			KEPALA SEKSI IRIGASI DAN RAWA	IV
304			KEPALA SEKSI SUNGAI, PANTAI DAN WADUK	IV
305			KEPALA SEKSI BINA MANFAAT IRIGASI, RAWA, PANTAI DAN SUNGAI	IV
306		BIDANG TATA RUANG	KEPALA BIDANG TATA RUANG	III
307			KEPALA SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG	IV
308			KEPALA SEKSI PEMANFAATAN RUANG	IV

309			KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN	IV
310		BIDANG TATA BINA JASA KONSTRUKSI	KEPALA BIDANG TATA BINA JASA KONSTRUKSI	III
311			KEPALA SEKSI PEMBINAAN KELEMBAGAAN JASA KONSTRUKSI	IV
312			KEPALA SEKSI KERJA SAMA, PEMBERDAYAAN & PENGEMBANGAN SDM	IV
313			KEPALA SEKSI PENGATURAN DAN PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI	IV
314		UPTD	KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	
315			KEPALA UPTD PENGUJIAN DAN STANDARISASI	
316			KEPALA UPTD WILAYAH SUNGAI	
317	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	SEKRETARIAT	SEKRETARIS	III
318			KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	IV
319			KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
320		BIDANG PERUMAHAN	KEPALA BIDANG PERUMAHAN	III
321			KEPALA SEKSI PERUMAHAN UMUM DAN KOMERSIAL	IV
322			KEPALA SEKSI PERUMAHAN SWADAYA	IV
323			KEPALA SEKSI PERUMAHAN KHUSUS	IV
324		BIDANG PERMUKIMAN	KEPALA BIDANG PERMUKIMAN	III
325			KEPALA SEKSI PERMUKIMAN	IV
326			KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	IV
327			KEPALA SEKSI INFRASTRUKTUR PERKOTAAN DAN PERDESAAN	IV
328	DINAS KETAHANAN PANGAN	KEPALA DINAS	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN	II
329		SEKRETARIAT	SEKRETARIS	III
330			KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	IV
331			KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
332		BIDANG KETERSEDIAAN, SUMBER DAYA DAN KERAWANAN PANGAN	BIDANG KETERSEDIAAN, SUMBER DAYA DAN KERAWANAN PANGAN	III
333			KEPALA SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN	IV
334			KEPALA SEKSI SUMBER DAYA PANGAN	IV
335			KEPALA SEKSI KERAWANAN PANGAN	IV
336		BIDANG DISTRIBUSI, CADANGAN DAN HARGA PANGAN	BIDANG DISTRIBUSI, CADANGAN DAN HARGA PANGAN	III
337			KEPALA SEKSI DISTRIBUSI PANGAN	IV
338			KEPALA SEKSI CADANGAN PANGAN	IV
339			KEPALA SEKSI HARGA PANGAN	IV
340		BIDANG PENGANEKARAGAMAN, KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	BIDANG PENGANEKARAGAMAN, KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	III
341			KEPALA SEKSI PENGANEKARAGAMAN PANGAN	IV
342			KEPALA SEKSI KONSUMSI PANGAN	IV
343			KEPALA SEKSI KEAMANAN PANGAN	IV

344		UPTD	KEPALA UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PENGAWASAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN (BSP-PSAT)	
345	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	KEPALA DINAS	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	II
346		SEKRETARIAT	SEKRETARIS	III
347			KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	IV
348			KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
349		BIDANG PENATAAN DAN PENAATAN PPLH	BIDANG PENATAAN DAN PENAATAN PPLH	III
350			KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN	IV
351			KEPALA SEKSI PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN	IV
352			KEPALA SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN	IV
353		BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPASITAS	BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPASITAS	III
354			KEPALA SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH	IV
355			KEPALA SEKSI PENGELOLAAN LIMBAH B3	IV
356			KEPALA SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	IV
357		BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	III
358			KEPALA SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN	IV
359			KEPALA SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	IV
360			KEPALA SEKSI PEMELIHARAN LINGKUNGAN	IV
361		UPTD	KEPALA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN	
362	DINAS PERHUBUNGAN	KEPALA DINAS	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	II
363		SEKRETARIAT	SEKRETARIS	III
364			KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	IV
365			KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
366		BIDANG PERHUBUNGAN DARAT	KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN DARAT	III
367			KEPALA SEKSI ANGKUTAN DARAT DAN KESELAMATAN LLAJ	IV
368			KEPALA SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS	IV
369			KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA JALAN	IV
370		BIDANG PERKERETAAPIAN DAN ASP	KEPALA BIDANG PERKERETAAPIAN DAN ASP	III
371			KEPALA SEKSI ANGKUTAN DAN KESELAMATAN PERKERETAPIAN	IV
372			KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA PERKERETAPIAN	IV
373			KEPALA SEKSI ANGKUTAN, SUNGAI DAN PENYEBERANGAN	IV
374		BIDANG PERHUBUNGAN LAUT DAN UDARA	KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN LAUT DAN UDARA	III
375			KEPALA SEKSI KEPELABUHANAN DAN KEBANDARUDARAAN	IV
376			KEPALA SEKSI ANGKUTAN LAUT DAN UDARA	IV
377			KEPALA SEKSI KESELAMATAN MARITIM DAN PENERBANGAN	IV

378		UPTD	KEPALA UPTD PERHUBUNGAN KABUPATEN MAMUJU UTARA	
379			KEPALA UPTD PERHUBUNGAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH	
380			KEPALA UPTD PERHUBUNGAN KABUPATEN MAJENE	
381			KEPALA UPTD PERHUBUNGAN KABUPATEN POLMAN	
382			KEPALA UPTD PERHUBUNGAN KABUPATEN MAMASA	
383	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	KEPALA DINAS	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	II
384		SEKRETARIAT	SEKRETARIS	III
385			KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	IV
386			KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET	IV
387			KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
388		BIDANG SARANA KOMUNIKASI DAN DESIMINASI INFORMASI	KEPALA BIDANG SARANA KOMUNIKASI DAN DESIMINASI INFORMASI	III
389			KEPALA SEKSI MONITORING, PENDAPAT UMUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT	IV
390			KEPALA SEKSI KOMUNIKASI LINTAS SEKTORAL, PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA INFORMASI	IV
391			KEPALA SEKSI KOMUNIKASI PUBLIK DAN DISEMINASI INFORMASI	IV
392		BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI DAN STATISTIK	KEPALA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI DAN STATISTIK	III
393			KEPALA SEKSI INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI	IV
394			KEPALA SEKSI LAYANAN DATA SEKTORAL DAN INTEGRASI SISTEM INFORMASI	IV
395			KEPALA SEKSI KEAMANAN INFORMASI DAN TELEKOMUNIKASI	IV
396		BIDANG LAYANAN E-GOVERNMENT	KEPALA BIDANG LAYANAN E-GOVERNMENT	III
397			KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI	IV
398			KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN EKOSISTEM E-GOVERNMENT	IV
399			KEPALA SEKSI TATA KELOLA E-GOVERNMENT	IV
400		BIDANG PERSANDIAN	KEPALA BIDANG PERSANDIAN	III
401			KEPALA SEKSI TATA KELOLA PERSANDIAN	IV
402			KEPALA SEKSI OPERASIONAL PENGAMANAN PERSANDIAN	IV
403			KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PERSANDIAN	IV
404		UPTD	KEPALA UPTD RADIO SIARAN BANUA MALAQBI	
405			KEPALA UPTD LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRIK (LPSE)	
406			KEPALA UPTD LAYANAN PENYIARAN	
407			KEPALA UPTD LAYANAN INFORMASI	
408	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM	KEPALA DINAS	KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM	II
409		SEKRETARIAT	SEKRETARIS	III
410			KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	IV

411			KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
412		BIDANG PERDAGANGAN	KEPALA BIDANG PERDAGANGAN	III
413			KEPALA SEKSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	IV
414			KEPALA SEKSI PERDAGANGAN LUAR NEGERI	IV
415			KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA	IV
416		BIDANG PERINDUSTRIAN	KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN	III
417			KEPALA SEKSI STANDARDISASI TEKNOLOGI IKM, ALAT TRANSPORTASI DAN TELEMATIKA	IV
418			KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI	IV
419			KEPALA SEKSI PROMOSI, INFORMASI DAN KERJA SAMA INDUSTRI	IV
420		BIDANG KOPERASI DAN UKM	KEPALA BIDANG KOPERASI DAN UKM	III
421			KEPALA SEKSI KOPERASI	IV
422			KEPALA SEKSI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	IV
423			KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN, PEMBIAYAAN DAN PROMOSI	IV
424		UPTD	KEPALA UPTD BALAI PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)	
425	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	KEPALA DINAS	KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	II
426		SEKRETARIAT	SEKRETARIS	III
427			KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	IV
428			KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET	IV
429			KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
430		BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA	KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA	III
431			KEPALA SEKSI PRODUKSI BUDIDAYA	IV
432			KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA BUDIDAYA	IV
433			KEPALA SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	IV
434		BIDANG PERIKANAN TANGKAP DAN TATA RUANG KELAUTAN	KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP DAN TATA RUANG KELAUTAN	III
435			KEPALA SEKSI PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN	IV
436			KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA PENANGKAPAN IKAN	IV
437			KEPALA SEKSI KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	IV
438		BIDANG PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	KEPALA BIDANG PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	III
439			KEPALA SEKSI DISTRIBUSI DAN PEMASARAN	IV
440			KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGOLAHAN MUTU PRODUK	IV
441			KEPALA SEKSI KEMITRAAN USAHA, INVESTASI DAN PROMOSI	IV
442		BIDANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	KEPALA BIDANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	III
443			KEPALA SEKSI PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	IV
444			KEPALA SEKSI KONSERVASI DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN	IV
445			KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM	IV

446		UPTD	KEPALA UPTD PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA (PPN) PALIPI	
447			KEPALA UPTD BALAI BENIH IKAN PANTAI (BBIP) PONIANG	
448			KEPALA UPTD BALAI BENIH BUDIDAYA AIR TAWAR (B3AT) TAMALLANTIK	
449	DINAS PERTANIAN	KEPALA DINAS	KEPALA DINAS PERTANIAN	II
450		SEKRETARIAT	SEKRETARIS	III
451			KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	IV
452			KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET	IV
453			KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
454		BIDANG SARANA DAN PRASARANA	KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA	III
455			KEPALA SEKSI LAHAN DAN INVESTASI	IV
456			KEPALA SEKSI PENGELOLAAN AIR IRIGASI PERTANIAN	IV
457			KEPALA SEKSI PUPUK, PESTISIDA, ALSIN DAN PEMBIAYAAN	IV
458		BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	III
459			KEPALA SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN	IV
460			KEPALA SEKSI PRODUKSI	IV
461			KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN	IV
462		BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	KEPALA BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	III
463			<b>KEPALA SEKSI PERBIBITAN, PRODUKSI DAN PAKAN</b>	IV
464			<b>KEPALA SEKSI KESEHATAN HEWAN</b>	IV
465			<b>KEPALA SEKSI KESMAVET, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN</b>	IV
466		BIDANG PENYULUHAN	KEPALA BIDANG PENYULUHAN	III
467			KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN	IV
468			KEPALA SEKSI KETENAGAAN	IV
469			KEPALA SEKSI METODE DAN INFORMASI	IV
470		BIDANG PRODUKSI PERKEBUNAN	KEPALA BIDANG PRODUKSI PERKEBUNAN	III
471			KEPALA SEKSI TANAMAN PERKEBUNAN	IV
472			KEPALA SEKSI PENANGANAN PASCA PANEN DAN PEMBINAAN USAHA	IV
473			KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL	IV
474		BIDANG PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN	KEPALA BIDANG PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN	III
475			KEPALA SEKSI PERBENIHAN	IV
476			KEPALA SEKSI PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN (OPT)	IV
477			KEPALA SEKSI GANGGUAN USAHA, DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DAN PENCEGAHAN KEBAKARAN	IV

478		UPTD	KEPALA UPTD BALAI PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
479			KEPALA UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
480			KEPALA UPTD BALAI PENGAWASAN, SERTIFIKASI DAN PENGUJIAN MUTU BENIH PERKEBUNAN	
481			KEPALA UPTD BALAI PROTEKSI DAN PERBENIHAN TANAMAN PERKEBUNAN	
482			KEPALA UPTD BALAI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN	
483			KEPALA UPTD LABORATORIUM DIAGNOSTIK KESWAN DAN KESMAVET	
484			KEPALA UPTD BALAI MEKANISASI PERTANIAN DAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS	
485			KEPALA UPTD BALAI PERBIBITAN DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK	
486			KEPALA UPTD INSEMINASI BUATAN	
487			KEPALA UPTD BALAI BENIH TANAMAN PANGAN	
488			KEPALA UPTD BALAI BENIH INDUK HORTIKULTURA	
489	DINAS KEHUTANAN	KEPALA DINAS	KEPALA DINAS KEHUTANAN	II
490		SEKRETARIAT	SEKRETARIS	III
491			KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	IV
492			KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
493		BIDANG TATA GUNA DAN PEMANFAATAN HUTAN	KEPALA BIDANG TATA GUNA DAN PEMANFAATAN HUTAN	III
494			KEPALA SEKSI TATA GUNA HUTAN	IV
495			KEPALA SEKSI PEMANFAATAN HUTAN	IV
496			KEPALA SEKSI PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN (PUHH)	IV
497		BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM (KSDAE)	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM (KSDAE)	III
498			KEPALA SEKSI PENGAMANAN HUTAN	IV
499			KEPALA SEKSI PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	IV
500			KEPALA SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM (KSDAE)	IV
501		BIDANG PENGELOLAAN DAS DAN PERHUTANAN SOSIAL	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN DAS DAN PERHUTANAN SOSIAL	III
502			KEPALA SEKSI REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	IV
503			KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DAS	IV
504			KEPALA SEKSI PENYULUHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL	IV
505		UPTD	KEPALA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LARIANG	
506			KEPALA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SARUDU	
507			KEPALA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PASANGKAYU	
508			KEPALA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BUDONG-BUDONG	
509			KEPALA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAROSSA	
510			KEPALA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KARAMA	
511			KEPALA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BONEHAU KALUMPANG	
512			KEPALA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MALUNDA	
513			KEPALA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MAPILLI	

514			KEPALA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MAMASA TENGAH	
515			KEPALA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MAMASA TIMUR	
516			KEPALA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MAMASA BARAT	
517	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	KEPALA DINAS	KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	II
518		SEKRETARIAT	SEKRETARIS	III
519			KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	IV
520			KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET	IV
521			KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
522		BIDANG GEOLOGI DAN AIR BAWAH TANAH	KEPALA BIDANG GEOLOGI DAN AIR BAWAH TANAH	III
523			KEPALA SEKSI PEMETAAN GEOLOGI DAN AIR TANAH	IV
524			KEPALA SEKSI KONSERVASI AIR TANAH	IV
525			KEPALA SEKSI PENGUSAHAAN AIR TANAH	IV
526		BIDANG MINERAL DAN BATUBARA (MINERBA)	KEPALA BIDANG MINERAL DAN BATUBARA (MINERBA)	III
527			KEPALA SEKSI PENGUSAHAAN AIR TANAH	IV
528			KEPALA SEKSI PENGUSAHAAN MINERBA	IV
529			KEPALA SEKSI PRODUKSI DAN PENJUALAN MINERBA	IV
530		BIDANG ENERGI	KEPALA BIDANG ENERGI	III
531			KEPALA SEKSI KONSERVASI ENERGI	IV
532			KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN ENERGI BARU TERBARUKAN	IV
533			KEPALA SEKSI PENGUSAHAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	IV
534		BIDANG KETENAGALISTRIKAN	KEPALA BIDANG KETENAGALISTRIKAN	III
535			KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN	IV
536			KEPALA SEKSI PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN	IV
537			KEPALA SEKSI PENGAWASAN KETENAGALISTRIKAN	IV
538		UPTD	KEPALA UPTD LABORATORIUM	
539			KEPALA UPTD WILAYAH I (KABUPATEN MAMUJU UTARA DAN MAMUJU TENGAH)	
540			KEPALA UPTD WILAYAH II (KABUPATEN MAMUJU DAN MAMASA)	
541			KEPALA UPTD WILAYAH III (KABUPATEN POLEWALI MANDAR DAN MAJENE)	
542	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	KEPALA BADAN	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	II
543		SEKRETARIAT	SEKRETARIS	III
544			KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	IV
545			KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET	IV
546			KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV

547		BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN MAKRO DAN PENGOLAHAN DATA	KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN MAKRO DAN PENGOLAHAN DATA	III
548			KEPALA SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAN POLITIK	IV
549			KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN MAKRO	IV
550			KEPALA SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA	IV
551		BIDANG PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN PELAPORAN	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN PELAPORAN	III
552			KEPALA SUB BIDANG PELAPORAN KINERJA PEMBANGUNAN	IV
553			KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN APBD	IV
554			KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN APBN	IV
555		BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	III
556			KEPALA SUB BIDANG INFRASTRUKTUR	IV
557			KEPALA SUB BIDANG PRASARANA WILAYAH DAN PEMUKIMAN	IV
558			KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH, ENERGI DAN TATA RUANG	IV
559		BIDANG EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA	KEPALA BIDANG EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA	III
560			KEPALA SUB BIDANG AGRIBISNIS, INDUSTRI DAN INVESTASI	IV
561			KEPALA SUB BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEPENDUDUKAN	IV
562			KEPALA SUB BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	IV
563	DINAS KESEHATAN	KEPALA DINAS	KEPALA DINAS KESEHATAN	II
564		SEKRETARIAT	SEKRETARIS	III
565			KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	IV
566			KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
567		BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	III
568			KEPALA SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT	IV
569			KEPALA SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	IV
570			KEPALA SEKSI PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	IV
571		BIDANG KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	KEPALA BIDANG KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	III
572			KEPALA SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI	IV
573			KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR	IV
574			KEPALA SEKSI PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA	IV
575		BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA	KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA	III
576			KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN	IV
577			KEPALA SEKSI KEFARMASIAN DAN ALKES	IV
578			KEPALA SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	IV
579		UPTD	KEPALA UPTD BALAI LAYANAN KESEHATAN	
580			KEPALA UPTD INSTALASI FARMASI	

581			KEPALA UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN	
582			KEPALA UPTD TRANSFUSI DARAH	
583			KEPALA UPTD RUMAH SAKIT	
584	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KEPALA DINAS	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	II
585		SEKRETARIAT	SEKRETARIS	III
586			KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	IV
587			KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
588		BIDANG PROMOSI DAN PENANAMAN MODAL	KEPALA BIDANG PROMOSI DAN PENANAMAN MODAL	III
589			KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	IV
590			KEPALA SEKSI PELAKSANAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	IV
591			KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA PROMOSI PENANAMAN MODAL	IV
592		BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	III
593			KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	IV
594			KEPALA SEKSI PEMBINAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	IV
595			KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL	IV
596		BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	III
597			KEPALA SEKSI PERENCANAAN PENANAMAN MODAL	IV
598			KEPALA SEKSI DEREGULASI PENANAMAN MODAL	IV
599			KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN USAHA	IV
600		BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A	KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A	III
601			KEPALA SEKSI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A/I	IV
602			KEPALA SEKSI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A/II	IV
603			KEPALA SEKSI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A/III	IV
604		BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B	KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B	III
605			KEPALA SEKSI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B/I	IV
606			KEPALA SEKSI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B/II	IV
607			KEPALA SEKSI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B/III	IV
608		BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN	KEPALA BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN	III
609			KEPALA SEKSI PENGADUAN DAN INFORMASI LAYANAN	IV
610			KEPALA SEKSI KEBIJAKAN DAN ADVOKASI LAYANAN	IV
611			KEPALA SEKSI PELAPORAN LAYANAN	IV
612	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	KEPALA DINAS	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	II

613		SEKRETARIAT	SEKRETARIS	III
614			KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	IV
615			KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET	IV
616			KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
617		BIDANG PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN	III
618			KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN	IV
619			KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERPUSTAKAAN	IV
620			KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA	IV
621		BIDANG DEPOSIT, PENGEMBANGAN KOLEKSI, LAYANAN DAN PELESTARIAN	KEPALA BIDANG DEPOSIT, PENGEMBANGAN KOLEKSI, LAYANAN DAN PELESTARIAN	III
622			KEPALA SEKSI DEPOSIT, PENGEMBANGAN KOLEKSI DAN PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN	IV
623			KEPALA SEKSI LAYANAN, OTOMASI DAN KERJASAMA PERPUSTAKAAN	IV
624			KEPALA SEKSI PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN	IV
625		BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN	KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN	III
626			KEPALA SEKSI HUKUM DAN PEMBINAAN PENCIPTA ARSIP	IV
627			KEPALA SEKSI PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA KEARSIPAN	IV
628			KEPALA SEKSI PENGAWASAN KEARSIPAN	IV
629		BIDANG PENGELOLAAN DAN LAYANAN ARSIP	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN DAN LAYANAN ARSIP	III
630			KEPALA SEKSI AKUISISI DAN PENGOLAHAN ARSIP	IV
631			KEPALA SEKSI PRESERVASI ARSIP	IV
632			KEPALA SEKSI LAYANAN DAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN	IV
633	DINAS PARIWISATA	KEPALA DINAS	KEPALA DINAS PARIWISATA	II
634		SEKRETARIAT	SEKRETARIS	III
635			KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	IV
636			KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET	IV
637			KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
638		BIDANG PEMASARAN PARIWISATA	KEPALA BIDANG PEMASARAN PARIWISATA	III
639			KEPALA SEKSI ANALISIS PASAR PARIWISATA	IV
640			KEPALA SEKSI PROMOSI WISATA	IV
641			KEPALA SEKSI INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI PARIWISATA	IV
642		BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	III
643			KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA ALAM DAN MINAT KHUSUS	IV
644			KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA BUDAYA	IV

645			KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA BAHARI	IV
646			KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA	III
647			KEPALA SEKSI PENGENDALIAN USAHA JASA PARIWISATA	IV
648			KEPALA SEKSI PENGENDALIAN USAHA SARANA PARIWISATA	IV
649			KEPALA SEKSI INVESTASI DAN PERIZINAN USAHA PARIWISATA	IV
650		BIDANG KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN PARIWISATA	KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN PARIWISATA	III
651			KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN KEMITRAAN	IV
652			KEPALA SEKSI STANDARDISASI, SERTIFIKASI DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA	IV
653			KEPALA SEKSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN	IV
654		UPTD	KEPALA UPTD TAMAN WISATA GENTUNGAN	
655			KEPALA UPTD ANJUNGAN SULAWESI BARAT DI TMII JAKARTA	
656	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	KEPALA DINAS	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	II
657		SEKRETARIAT	SEKRETARIS	III
658			KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	IV
659			KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET	IV
660			KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
661		BIDANG PEMERINTAHAN DESA	KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA	III
662			KEPALA SEKSI PENATAAN ADM. PEMERINTAHAN DESA & PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR	IV
663			KEPALA SEKSI PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN KERJA SAMA DESA	IV
664			KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN	IV
665		BIDANG PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	III
666			KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN BUMDESA DAN PERMODALAN DESA	IV
667			KEPALA SEKSI PERDAGANGAN DAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DESA	IV
668			KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	IV
669		BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	III
670			KEPALA SEKSI PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM	IV
671			KEPALA SEKSI PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	IV
672			KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN	IV
673		BIDANG PELAYANAN SOSIAL DASAR DAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA	KEPALA BIDANG PELAYANAN SOSIAL DASAR DAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA	III
674			KEPALA SEKSI PELAYANAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	IV
675			KEPALA SEKSI ADAT BUDAYA DAN PERLINDUNGAN SOSIAL	IV

676			KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA	IV
677	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	KEPALA DINAS	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	II
678		SEKRETARIAT	SEKRETARIS	III
679			KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	IV
680			KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET	IV
681			KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
682		BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, KELUARGA, DATA DAN INFORMASI	BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, KELUARGA, DATA DAN INFORMASI	III
683			KEPALA SEKSI PELEMBAGAAN DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG EKONOMI	IV
684			KEPALA SEKSI PELEMBAGAAN DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK DAN HUKUM	IV
685			KEPALA SEKSI PELEMBAGAAN DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG KUALITAS KELUARGA, DATA DAN INFORMASI	IV
686		BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK	BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK	III
687			KEPALA SEKSI PENGASUHAN ALTERNATIF DAN PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA	IV
688			KEPALA SEKSI HAK SIPIL, INFORMASI DAN PARTISIPASI	IV
689			KEPALA SEKSI KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAAN	IV
690		BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	III
691			KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	IV
692			KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	IV
693			KEPALA SEKSI DATA KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK	IV
694		BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	III
695			KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KESERTAAN KB	IV
696			KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN KELUARGA SEJAHTERA	IV
697			KEPALA SEKSI PEMADUAN DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PENDUDUK	IV
698		UPTD	KEPALA UPTD PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	
699	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	KEPALA BADAN	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	II
700		SEKRETARIAT	SEKRETARIS	III
701			KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	IV
702			KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN	IV
703			KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
704		BIDANG PENDAPATAN PAJAK DAERAH	KEPALA BIDANG PENDAPATAN PAJAK DAERAH	III

705			KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN ADMINISTRASI	IV
706			KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENAGIHAN	IV
707			KEPALA SUB BIDANG EVALUASI DAN PENGENDALIAN	IV
708		BIDANG PENDAPATAN NON PAJAK DAERAH	KEPALA BIDANG PENDAPATAN NON PAJAK DAERAH	III
709			KEPALA SUB BIDANG PENDAPATAN RETRIBUSI	IV
710			KEPALA SUB BIDANG PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN DAN DANA TRANSFER	IV
711			KEPALA SUB BIDANG PENDAPATAN LAIN-LAIN	IV
712		BIDANG ANGGARAN DAN BINA KAB/KOTA	KEPALA BIDANG ANGGARAN DAN BINA KAB/KOTA	III
713			KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG	IV
714			KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN BELANJA LANGSUNG DAN PEMBIAYAAN	IV
715			KEPALA SUB BIDANG BINA KABUPATEN/KOTA	IV
716		BIDANG PERBENDAHARAAN	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN	III
717			KEPALA SUB BIDANG BELANJA LANGSUNG	IV
718			KEPALA SUB BIDANG BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN PEMBIAYAAN	IV
719			KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	IV
720		BIDANG AKUNTANSI	KEPALA BIDANG AKUNTANSI	III
721			KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI KEUANGAN	IV
722			KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI BARANG MILIK DAERAH	IV
723			KEPALA SUB BIDANG PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN	IV
724		BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	III
725			KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENGADAAN	IV
726			KEPALA SUB BIDANG PENGGUNAAN, PEMANFAATAN DAN PENGAMANAN	IV
727			KEPALA SUB BIDANG PENATAUSAHAAN DAN PENGENDALIAN	IV
728		UPTB	KEPALA UPTB SAMSAT KABUPATEN MAMUJU	
729			KEPALA UPTB SAMSAT KABUPATEN MAMUJU UTARA	
730			KEPALA UPTB SAMSAT KABUPATEN MAMASA	
731			KEPALA UPTB SAMSAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR	
732			KEPALA UPTB SAMSAT KABUPATEN MAJENE	
733	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	KEPALA BADAN	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	II
734		SEKRETARIAT	SEKRETARIS	III
735			KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	IV
736			KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET	IV
737			KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
738		BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI	KEPALA BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI	III
739			KEPALA SUB BIDANG FORMASI DAN PENGADAAN PEGAWAI	IV

740			KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN KARIER	IV
741			KEPALA SUB BIDANG KINERJA DAN KOMPETENSI PEGAWAI	IV
742		BIDANG MUTASI DAN KEPANGKATAN	KEPALA BIDANG MUTASI DAN KEPANGKATAN	III
743			KEPALA SUB BIDANG MUTASI	IV
744			KEPALA SUB BIDANG KENAIKAN PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL	IV
745			KEPALA SUB BIDANG KENAIKAN PANGKAT JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN ADMINISTRASI	IV
746		BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI	KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI	III
747			KEPALA SUB BIDANG PENGAWASAN DAN DISIPLIN PEGAWAI	IV
748			KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN KESEJAHTERAAN DAN PENGHARGAAN PNS	IV
749			KEPALA SUB BIDANG PENSIUN, PEMBINAAN MENTAL DAN JASMANI PNS	IV
750		BIDANG INFORMASI DAN PENGOLAHAN DATA PEGAWAI	KEPALA BIDANG INFORMASI DAN PENGOLAHAN DATA PEGAWAI	III
751			KEPALA SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA PEGAWAI	IV
752			KEPALA SUB BIDANG DOKUMENTASI	IV
753			KEPALA SUB BIDANG INFORMASI DAN PELAPORAN	IV
754	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	KEPALA BADAN	KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	II
755		SEKRETARIAT	SEKRETARIS	III
756			KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM, UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
757			KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN	IV
758		BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN PENGELOLAAN KELEMBAGAAN	KEPALA BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN PENGELOLAAN KELEMBAGAAN	III
759			KEPALA SUB BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI	IV
760			KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI	IV
761			KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN SUMBER BELAJAR DAN KERJA SAMA	IV
762		BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS INTI	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS INTI	III
763			KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI JABATAN ADMINISTRASI URUSAN KONKUREN WAJIB PELAYANAN DASAR DAN PILIHAN	IV
764			KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI JABATAN ADMINISTRASI URUSAN KONKUREN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	IV
765			KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI JABATAN ADMINISTRASI PERANGKAT DAERAH PENUNJANG	IV
766		BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL	III
767			KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN DAERAH DAN PIMPINAN TINGGI	IV
768			KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL	IV
769			KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEPEMIMPINAN DAN PRAJABATAN	IV
770	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	KEPALA BADAN	KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	II
771		SEKRETARIAT	SEKRETARIS	III

772			KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM, UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
773			KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN	IV
774		BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA	KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA	III
775			KEPALA SUB BIDANG PEMERINTAHAN	IV
776			KEPALA SUB BIDANG SOSIAL BUDAYA	IV
777			KEPALA SUB BIDANG KEPENDUDUKAN DAN SDM	IV
778		BIDANG EKONOMI DAN PRASARANA WILAYAH	KEPALA BIDANG EKONOMI DAN PRASARANA WILAYAH	III
779			KEPALA SUB BIDANG EKONOMI, PERTANIAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	IV
780			KEPALA SUB BIDANG FISIK DAN PRASARANA WILAYAH	IV
781			KEPALA SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN	IV
782		BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN IPTEK	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN IPTEK	III
783			KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN IPTEK	IV
784			KEPALA SUB BIDANG PENERAPAN IPTEK	IV
785			KEPALA SUB BIDANG SOSIALISASI DAN PUBLIKASI INOVASI DAN TEKNOLOGI	IV
786	BADAN PENGHUBUNG	KEPALA BADAN	KEPALA BADAN PENGHUBUNG	III
787			KEPALA SUB BIDANG TATA USAHA DAN KEUANGAN	IV
788			KEPALA SUB BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	IV
789			KEPALA SUB BIDANG PROMOSI, DATA DAN INFORMASI DAERAH	IV
790	SEMUA OPD		PPK NON STRUKTURAL	
791			PPTK NON STRUKTURAL	
792			BENDAHARA	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Mamuju, 19 Maret 2018  
KEPALA BIRO HUKUM,

**BUJAERAMY HASSAN, SH**  
Pangkat: Pembina  
NIP.: 19750630 200212 1 010

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

**ttd**

**H. M. ALI BAAL MASDAR**